

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten terletak di Barabai. Semboyan: “Murakata” yang artinya Mufakat seia sekata baik dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan. Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah 1.472 km² dengan 11 kecamatan dan 161 desa. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki penduduk sebanyak 261.042 jiwa.

Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima antara Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor Des-575-1-9 tanggal 5 Desember 1959. Dengan demikian, sejak tanggal 24 Desember 1959 Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdiri sendiri, terpisah dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan di Kandangan. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.³²

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki visi, yaitu “Terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang Lebih Makmur, Unggul dan Dinamis (Muda)” Sedangkan, misi yang diusung Kabupaten Hulu Sungai Tengah ialah

³² https://www.hstkab.go.id/home/sejarah_hst diakses pada 29 September 2023 pukul 18.37
WITA

1. “Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten yang Menerapkan Tata Kehidupan Dengan Nilai-Nilai Spiritual dan Kultural.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prinsip Memanusiakan Manusia.
4. Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
5. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan dan Sosial.”

Secara geografis kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi disebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai yang umum disebut “banua anam”. Kabupaten ini memiliki jarak sepanjang 150 km dari Kota Banjarbaru yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Balangan

Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru

Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dengan letak geografis dan batas wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi.

Untuk *topografi* rawa yang tersebar berada di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan *hortikultura*. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun, dengan komoditas pertanian yang lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayurmayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, kelapa serta tanaman lainnya.

Secara klimatologi, jumlah curah hujan tahunan rata-rata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebanyak 175 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 140 hari/tahun dan intensitas suhu antara 21,04°C sampai dengan 37,02°C. Berdasarkan penggunaan lahan, terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa hutan lindung adalah seluas ± 60.622 ha yang meliputi di kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, Haruyan dan Batang Alai Selatan; kawasan lindung berupa kawasan resapan air seluas 656 ha di Kecamatan Labuan Amas Utara; Kawasan

perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai seluas 22.033 ha, kawasan sekitar mata air dan kawasan RTH; dan kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana berupa rawan tanah longsor, banjir dan kebakaran. Kawasan rawan tanah longsor seluas 1.500 ha meliputi wilayah pegunungan di kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan dan Haruyan. Kawasan rawan banjir seluas 29.930 ha khususnya pada kawasan sekitar aliran sungai Batang Alai, Barabai dan Haruyan.³³

Adapun data wilayah banjir di kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam tiga tahun berturut-turut, berikut:

DATA SEMENTARA KORBAN BANJIR SE-KABUPATEN HST TAHUN 2021
PUSDALOPS BPBD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

tanggal 09 FEBRUARI 2021 PUKUL 09.00 WITA

No	Kecamatan	DESA	RT	Orang Hilang	Orang Meninggal	Rumah			Rumah Terendam	Jumlah KK	Jumlah Jwa	Jumlah Pengungsi	Facilities Umum (Rusak/Terendam)									Jumlah Pokok Per Desa	KETERANGAN AKTIF/TIDAK AKTIF	FOSKO HSEKATA N	Korban jiwa (KJM)									
						Hilang	Rusak Berat	Rusak					Mesjid	Langgar	Bekah	Kantor	Jembatan	pasar	Ruas Jalan	Meletr	Kerusakan lainnya													
1	BATANG ALAI SELATAN	Kias						90	64	330																		1	TIDAK AKTIF		0			
		Kel. Birayang	1,2 dan 7						39	32	128																							
		Tanah Habang							56	65	280																							
		Cukan Lipai							157	191	805																							
		Mathela							9	7																								
		Rangas							12	7																								
		Wawai	4 dan 5						10	9																								
		Paya							49	7																								
		Banua Rantau							6																									
		Lok Besar							43																									
				JUMLAH		0	0	0	0	469	492	1.329	0	0	0	0	0	0	1				0	0	19	0		6	0					
2	LABUAN AMAS UTARA	1. Kasarangan								312	937		1	5	3	1	1	1							1	TIDAK AKTIF								
		2. Kadunbung								10	40															3	TIDAK AKTIF							
		3. Banua Kusang								29	56															4	TIDAK AKTIF							
		4. Mantas								250	759					1		2									1	AKTIF				100		
		5. Pahalatan								11	26					1											1	AKTIF						
		6. Rantau Bujur								25	78				1	2		6	1								1	AKTIF				100		
		7. Rantau Kemuning									153	312																5	TIDAK AKTIF					
		8. Samhurang									1	3																6	TIDAK AKTIF					
		9. Sungai Buluh									55	130					1											1	TIDAK AKTIF				30	
		10. Binta Pirau									7	17																						
				JUMLAH		0	0	0	0	36	853	2.358	0	1	6	8	1	11	2	0	0	0	0	25	0		1							
3	BATANG ALAI UTARA	1. Sumanggi Seberang	01 - 08							137	137	411					2																	
		2. Muara Rintis								145	145	455					1																	
		3. Ilung Pasar Lama	02 & 03							46	5	100	465																					
		4. Telang	09								30	88	99				1		1	1	1	1												
		5. Hapingin	01 - 08								15	43																						
		6. Awang Baru	02 - 03								180	172	492					4		2														
		7. Ilung	04								157	157	471				0	0	3	4		1	3											
		8. Ilung Tengah									255	270	760				2	4	3															
		9. Sumanggi	04 & 07								200	230	465					1																
		10. Maringgai									44	58	176																					
		11. Dangau									3	3	14																					
		JUMLAH		0	0	0	48	1.094	1.365	3.810	0	1	3	14	10	3	2	16	0	0	0			1										
4	LABUAN AMAS SELATAN	1. Panggang Merak								83	83	236					1																	
		2. Sungai Jaranti								99	99	292																						
		3. Murung Tatal								85	85	167																						
		4. Tabudarat Hulu								100	335	936																						
		5. Jami								33	33	127																						
		6. Banua Kepayang								146	146	584																						
		7. Kelurahan Pantai Hbw								178	178	712																						
		8. Mundar								24	24	46																						
		9. Sungai Rangas								38	38	85																						
		10. Jami								8	32	127																						
				JUMLAH		0	0	0	0	794	1.053	3.311	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26				

³³ LPPD 2022 Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DATA TERDAMPAK BANJIR BULAN NOVEMBER TAHUN 2021
DATA UPDATE KAMIS 25 NOVEMBER 2021

No	Tanggal Kejadian 15/11/2021	Lokasi Kejadian					Jumlah Pengungsi		Kerugian															KETERANGAN			
		Kecamatan	DESA	Jenis Bencana	Rumah Terendam	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	15/11/2021	19/11/2021	Fasilitas Badak	Sekolah	Kantor	Jembatan		Pasar	Ruang Jalan Terendam (TBR)	Hewan Ternak Lainnya		Lahan Pertanian (Ha)	Fasilitas dan Kesehatan		Longsor (Meter)	PETUGAS LAPANGAN				
													Jumlah	Ket			Jumlah (Ekor)	Jenis Ternak		Jumlah	Keterangan		NEGERI	SWASTA			
1		BAS	1. Kel. Birayang 2. Lurjak 3. Cukan Lipa 4. Tanah Hebang	Banjir	22 0 190 19	22 0 190 21	56 0 547 56	0 0 0 0	1 0 0 0	0 1 0 0	0 0 0 0							137			0						
2		BATARA	1. Sumanggi Seberang 2. Rung pasar lama 3. Awang Baru	Banjir	0 60 0	0 65 0	0 221 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0		3	2 Terendam, 1 Miring	0 0 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0		1	Tanggal Jebot	0				
3		BARABAI	1. Kel. Bt. Darat 2. Kel. Bt. Temur 3. Kel. Bt. Selatan 4. Kel. Bt. Utara 5. Kel. Bt. Barat 6. Kel. Bukit 7. Pajukangan 8. Mandingin 9. Bernawa Tengah	Banjir	1381 430 489 552 574 568 132 262 68	1451 430 537 628 647 622 149 289 75	4445 1302 1590 1723 1503 1582 460 1157 190	181 234 30 0 0 0 0 1820 0	188 5 5 0 5 0 0 4 1	3 4 3 3 5 0 0 3 0	19 2 0 2 1 0 0 4 0	4 2 0 0 0 0 0 2 0	4 2 0 0 0 0 0 2 0		Terendam	0 0 0 0 0 0 0 4 0	12 0 8 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 1 0 1 0 0 0 0					
4		BAT	1. Hmas kiri 2. Batu Tanggal 3. Tandilang	Banjir	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 1 0			Rusak	0 0 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0			0 0 30					
5		HARUYAN	1. Haruyan 2. Mangunang	Banjir	0 0	0 0	0 0	0 0	4 0	4 1	0 0	0 0				0 0	2 0	0 0	0 0			0 1	Berongrong lepas	0			
6		BT. BENAWA	1. Akan Mati 2. Akan Besar 3. Pipa Besar 4. Babi 5. Lurah 6. Akan 7. Pantai Bawang	Banjir	14 184 222 99 0 96 5	17 198 222 180 0 113 5	53 198 709 311 0 300 19	0 0 55 0 0 0 0	0 2 2 6 0 3 0	0 1 1 3 1 0 0	0 0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0		Terendam	0 0 6 0 0 0 0	0 0 0 5 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0						

BPRD HST, TH. POL. I. Dinas Sosial, Dmar
 Tapana HST, PMI HST, BPK, PMK

7		HANTAKAN	1. Pasting 2. Pakalain 3. Batu Tanggal 4. Kindingan 5. Muring B 6. Haruyan Dayak 7. Hmas Kanan 8. Tahan 9. Ar 10. Datar Ajib 11. Datarak	Longsor Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Longsor Banjir Banjir Banjir Banjir	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				150	200	50	800	50	325	25	140	30					
8		PANDAWAN	1. Jansih 2. Masraan 3. Kaya Bahak 4. Paljaja 5. Batu Bawa 6. Kuant Utara	Banjir	107 17 240 23 3 1	107 18 244 23 3 1	344 63 891 76 7 4	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 2 1 0 0 0	0 2 3 0 0 0				0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0														
9		LAS	1. Marung Tadi 2. J-d 3. Panti Hasmang Timur 4. Mengkal 5. Tabadrad Hala 6. Bawa Keping 7. Mander 8. Marang Bahabang 9. Panti Hasmang Barat	Banjir	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0					0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0													
10		LAE	1. Kesragan	Banjir	79	115	201	0	0	4	0	1	0			0	3	0	0			0		0										
		Jumlah Se- Kab HST			5.837	6.292	18.019	1520	188	50	59	25	37		2	51	30405		246,6	11		1800												

* Pasting - Wawa merupakan salah satu Desa 15 Kecamatan HST
 Panti Hasmang 70 Kecamatan HST

Gambar 2 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HST 15 November Th. 2021.



**DATA REKAP BENCANA BANJIR
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2022**




NO	BULAN	TANGGAL	KECAMATAN	DESA	TERDAMPAK				SARANA DAN PRASARANA								
					Rumah	KK	JIWA	Mengungsi (Ijwa)	Fasilitas Ibadah	Sekolah	Kantor	Pasar	Jembatan	Jalan	Fasilitas Umum		
													Jumlah	Ket			
1	Januari	11 Januari 2022	Batu Benawa	Aluan Besar	185	213	612		1								
				Paya Besar													
				Haruyan	135	145	480		3	4							
				Lokbuntar	15	18	60										
				Haruyan Seberang	18	23	78										
			Barabai	Barabai selatan	117	115	325		3	1							
				Barabai Utara	5												
				Barabai Darat	100	110	350										
TOTAL					575	624	1905	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0
2	Januari	12 Januari 2022	Pandawan	Masiraan													
				Jaranih													
3	Januari	25 Januari 2022	Haruyan	Haruyan	50	50	152		1	4							
				Haruyan Seberang	56	58	210										
TOTAL					106	108	362	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL BULAN JANUARI					681	732	2267	0	8	9	0	0	0	0	0	0	0
4	Februari	07 Februari 2022	Haruyan	Mangunang Seberang	39	39	130		1	3							
				Mangunang	14	14	50										
				Haruyan	141	151	498		3	6					1	Polsek	
				Haruyan Seberang	56	58	210										
				Lokbuntar	15	18	60										
			BATU BENAWA	Aluan Besar													
TOTAL					265	280	948	0	4	9	0	0	0	0	1	0	0
5	Februari	08 Februari 2022	LAS	Tabudarat Hulu	12	12	34		1								
				Pantai Hambawang Barat					1	1							
TOTAL					12	12	34	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Februari	09 Februari 2022	PANDAWAN	Masiraan	151	151	612		1	1							
TOTAL					151	151	612	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL BULAN FEBRUARI					428	443	1594	0	7	11	0	0	0	0	1	0	


7	Agustus	17 Agustus 2022	Haruyan	Haruyan Sebrang		135	405	7	3	6	1						
				Haruyan	135	145	480										
				Mangunang													
				Mangunang Seberang													
				Lokbuntar	15	18	60										
			Batu Benawa	Aluan Besar	128	134	397										
				Aluan	91	105	308										
			Hantakan	Murung B	154	167	439		1	2	1						
				Tilahan													
				Patikalain										1			
				Pasting										3			
TOTAL					523	704	2089	7	4	8	2	0	4	0	0	0	0
TOTAL BULAN AGUSTUS					523	704	2089	7	4	8	2	0	4	0	0	0	0
8	September	09 September 2022	Haruyan	Mangunang Seberang	228	195	575		1	1	1	1					
				Mangunang	55	63	255										
				Haruyan	135	145	480		3	6	1				1	Puskesmas	
				Haruyan Seberang	125	135	405										
				Lokbuntar	15	18	60										
			Batu Benawa	Aluan Besar	207	224	624										
				Haliau	9	11	34										
			Barabai	Benawa Tengah													
				Kel. Barabai Darat					7								
				kel. Barabai Selatan	50	53	115		2	1	3	1					
				Kel. Barabai Barat													
				Kel. Barabai Utara								1					
				Kel. Barabai Timur									2				
				Mandingin							1						
			Hantakan	Pasting											1		
				Murung B												1	
				Tilahan										1			
				Batu Tunggul										1			
				Hinas Kanan										1			
			LAS	Pantai Hambawang Barat	40	40	130										
TOTAL					864	884	2678	7	6	8	8	3	3	2	1	0	0
9	September	10 September 2022	Pandawan	Masiraan	185	206	676			1	1						
				Jaranih	465	526	1470										
TOTAL					650	732	2146	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL BANJIR 09 SEPTEMBER 2022					1514	1616	4824	7	6	9	9	3	3	2	1	0	

10	September	24 September 2022	Batu Benawa	Aluan Besar	207	226	624										
TOTAL					207	226	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL BULAN SEPTEMBER					1721	1842	5448	7	6	9	9	3	3	2	1	0	
11	Oktober	24 Oktober 2022	Haruyan	Haruyan	135	145	480		3	6	1					1	Puskesmas
				Haruyan Seberang	125	135	405										
				Lokbuntar	15	18	60										
			Batu Benawa	Aluan Bakti	26	29	97										
				Aluan Besar	207	226	625										
				Paya Besar													
			Barabai	Kel.Barabai Selatan	59	61	187		3		3	1			1	Hotel	
				Kel.Barabai Utara	73	73	224		3	3	1	1					
				Kel.Barabai Timur	160	160	380										
				Kel.Barabai Barat	170	170	524										
				Mandingin	40	40	133		1	2							
			Pandawan	Jaranih	17												
				Masiraan	35												
TOTAL					1062	1057	3115	0	10	11	5	2	0	0	2	0	
TOTAL BULAN OKTOBER					1062	1057	3115	0	10	11	5	2	0	0	2	0	
TOTAL KESELURUHAN					4415	4778	14513	14	35	48	16	5	7	2	4	0	

Gambar 3 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HST Th. 2022.



**DATA REKAP BENCANA BANJIR
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2023**



NO	BULAN	TANGGAL	KECAMATAN	DESA	TERDAMPAK				SARANA DAN PRASARANA						SOSIAL EKONOMI			Terendam					
					Rumah	KK	JIWA	Mengungsi (Jawa)	Fasilitas Ibadah	Sekolah	Kantor	Pasar	Jembatan	Jalan	Fasilitas Umum Jumlah	Ket	Kebun (Ha)		Hutan (Ha)	Lahan Pertanian (Ha)			
1	Februari	25 Februari 2023	Haruyan	Haruyan	135	145	480		3	6	1					1	Puskesmas						
				Haruyan Seberang	125	135	405																
				Lokbuntar	15	18	60																
				Pengambau Hilir Luar	42	42	150																
				Pengambau Hilir Dalam	160	160	577																
			Batu Benawa	Aluan Besar	365	346	1025		1	1													
				Paya Besar	93	202	381		1														
			Barabai	Kel. Barabai Timur	52	52	114		1														
				Pantai Hambawang barat	223	165	312		1														
		26 Februari 2023	Pandawan	Masiraan	200	232	677		4	4											48		
TOTAL					1410	1497	4181	0	11	11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	48	
TOTAL BULAN FEBRUARI					1685	1795	5126	0	14	17	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	48	
3	Maret	16 Maret 2023	Haruyan	Haruyan	135	145	480		3	6	1				1	Puskesmas							
				Haruyan Seberang	125	135	405																
				Lokbuntar	15	18	60																
			Batu Benawa	Aluan Besar	360	360	1014																
				Paya Besar	93	202	381		1														
			Hantakan	Tilahan																			
				Patikalain									1										
				Haruyan Dayak																			
		17 Maret 2023	Barabai	Kel. Barabai Barat	120	120	380	180															
				Kel. Barabai Timur	160	160	380	93															
				Kel. Barabai Selatan	59	61	187		3		3	1											
				Kel. Barabai Utara	73	73	224		3	3	1	1											
		18 Maret 2023	Pandawan	Masiraan	200	232	677		4	4													
				Jaranih	442	487	1526		6	4	1												
				Palajau	36	41	110																
				Kayu Rabah	500	750	1810		1														
				Mahang Matang	10	5	20																
				Landung	4	3	9																
				Matang Ginalon	4	3	9																
		23 Maret 2023	Labuan Amas Utara	Pahalatan	300	348	966		1	2												47	
TOTAL					2632	3140	8629	273	22	19	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	47	
4		26 Maret 2023	Limpasu	Karatungan	17	17	57																
				Abung	46	49	68																
TOTAL					63	66	125																
5		30 Maret 2023	Pandawan	Kayu Rabah	643	703	2211		2	2	1											330	
				Labuan Amas Utara	908	1063	3118		7		1	1			1	Puskesmas						521	
TOTAL					1551	1766	5329	0	9	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	851
TOTAL BULAN MARET					4246	4992	14063	273	31	21	8	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	898
TOTAL KESELURUHAN					9911	10781	30229	170	49	38	19	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	946

Gambar 4 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HST Th. 2023.

B. Sajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan sejak 23 Agustus hingga 13 September 2023 secara langsung di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan DPRD, Dinas Sosial, dan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut

1. Informan Pertama

Nama : Yajid Fahmi
Tempat, Tanggal Lahir : Buluan, 22 Januari 1978
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi II DPRD HST
Alamat : Jl. Gerilya Desa Buluan Kecamatan Pandawan
Uraian Wawancara :

Dari segi pengawasan terhadap anggaran dan dampak di masyarakat atas hasil kerja dari Pemerintah Daerah. mereka melihat dari masalah pertanian ada pengendapan lumpur di beberapa daerah, harapan mereka, seharusnya hal itu sudah bisa diatasi ketika 2021. Namun, sampai saat ini hal itu belum maksimal, padahal sudah dianggarkan. Selain itu, banjir menyisakan masalah di bagian bawah atau daerah hilir karena belum dinormalisasi. Padahal juga sudah dianggarkan sehingga lahan pertanian sudah tidak bisa digunakan pada 3 tahun terakhir.

Dari segi kegiatan, mereka melihat uang anggaran. Apakah sudah sesuai atau tidak. Mereka tidak ingin anggaran hanya dapat dirasakan oleh beberapa

kelompok, bahkan hanya satu kelompok karena mereka ingin semua kelompok merasakan.

Mereka berusaha maksimal melalui anggota DPR RI perwakilan Kalimantan Selatan melakukan normalisasi sungai, khususnya di sungai daerah Barabai. Setidaknya sudah berdampak, walaupun tidak terlalu besar.

Penyebab paling utama karena kerusakan hutan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sejak 2016, 30% hutan hilang akibat penebangan liar. Di saat bersamaan, reboisasi lambat sehingga air tidak bisa diserap banyak pohon yang ada di hutan.³⁴

2. Informan Kedua

Nama : Taufik Rahman

Tempat, Tanggal Lahir : Barabai, 12 November 1978

Pendidikan : S-1

Pekerjaan : Wakil Ketua 2 DPRD HST

Alamat : Jl. Noorman Hasim Desa Aluan Sumur RT. 05
RW. 03

Pengawasan supaya infrastruktur banjir dapat dibenahi dan diperbaiki dengan secepatnya karena dampak banjir telah melumpuhkan ekonomi masyarakat. Lalu, masalah pengawasan berupa penggunaan dana APBD yang mereka keluarkan untuk menangani banjir. Artinya seberapa besar mereka keluarkan dana, untuk keperluan sosial.

³⁴ Informan I (Yajid Fahmi, anggota DPRD Komisi II) wawancara tanggal 23 Agustus 2023

Pemerintah daerah dalam menangani banjir memang belum maksimal, ada masukan-masukan dari masyarakat karena rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah kurang maksimal dan kurang sesuai. Kemudian, penanganan pasca banjir belum begitu maksimal, terutama di titik-titik yang menghancurkan gedung atau bangunan yang vital, seperti sekolah karena sampai hari ini belum semuanya teratasi atau diperbaiki. Sedangkan setiap tahun, di DPRD selalu mereka bahas dan anggarkan terus.

DPRD hanya mengawasi dan tidak menindak tegas karena tugas mereka hanya melakukan penganggaran dan pengawasan. Mereka ada menganggarkan dana untuk perencanaan penanggulangan banjir supaya di sekolahan dan tempat-tempat lainnya ke depannya tidak banjir lagi. Lalu, mereka bersama instansi lainnya berusaha agar tidak banjir lagi, melalui upaya pengerukan sungai dan juga pembangunan bendungan beserta kolam regulasi. Kolam regulasi berfungsi menampung air yang turun dari gunung dan ditampung supaya jangan sampai turun ke kota Barabai.

faktor penyebab banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa meluapnya sungai, cuaca ekstrim, dan penebangan pohon ilegal.³⁵

3. Informan Ketiga

Nama : Laela Irnawati, M.Pd.

Tempat, Tanggal Lahir : Wawai, 12 September 1977

Pendidikan : S-2

Pekerjaan : Anggota Komisi III DPRD HST

³⁵ Informan II (Taufik Rahman Wakil Ketua DPRD) wawancara tanggal 23 Agustus 2023

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Komplek Bulau Indah RT. 15
Kelurahan Barabai Utara

Pengawasan sangat diperlukan dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar sesuai dengan hal yang diprioritaskan, seperti musibah banjir. DPRD meminta kepada pemerintah daerah terkait pasca banjir karena harus memprioritaskan mana yang dibenahi dan diperbaiki (akibat banjir). Seperti infrastruktur berupa jalan dan jembatan sangat penting bagi warga karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi ekonomi. Jadi, mereka memang langsung turun ke lapangan untuk memantau sampai mana pembangunan.

mereka biasanya memanggil dinas terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial PPKB PPPA, dan BPBD untuk mengadakan rapat dengan komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah membahas permasalahan banjir.

Kendala yang dihadapi berupa dana yang terbatas karena APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih di bawah rata-rata dari APBD daerah lain. Untuk penanganan banjir sudah maksimal, tetapi hanya terkendala dana. Pemerintah daerah memang fokus terhadap banjir dan menyesuaikan mana yang prioritas. Upaya lain ialah membangun kolam regulasi untuk penampungan air dan juga dibangun bendungan, tetapi masih dalam tahap dikaji dan kemungkinan akan terealisasi beberapa tahun lagi.

Ada 2 faktor penyebab banjir, faktor pertama karena curah hujan, faktor kedua karena berkurangnya pohon sehingga kurang bisa menyerap air akibat penebangan pohon ilegal sehingga gunung gundul.³⁶

4. Informan Keempat

Nama : H. Rachmadi
 Jabatan : Ketua DPRD
 Tempat, Tanggal lahir : Barabai, 08 Januari 1954
 Pendidikan : S-1
 Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Barabai
 Uraian Wawancara :

Pihak DPRD menerima aspirasi masyarakat dan berkerja sama dengan seluruh instansi terkait yang menangani bencana banjir. Selain itu, ada juga bantuan dari pemerintah kabupaten tetangga dan juga pemerintah provinsi. Dalam penanganan ini, disebabkan keadaan darurat, maka pengawasan tidak bisa dilakukan dengan ketat. Maka dari itu, mereka berkoordinasi langsung di lapangan dengan BPBD dan dinas terkait.

DPRD membantu anggaran sebanyak 47% untuk bencana banjir. Jadi, mereka menganggarkan uang itu sebagai bentuk pengawasan. Selain itu, mereka sering mengadakan rapat, bahkan juga pernah rapat dadakan.³⁷

5. Informan Kelima

Nama : H. Budi Haryanto, S.Kep, NS, MM.

³⁶ Informan III (Laela Irnawati, M.Pd. anggota komisi III DPRD HST) wawancara tanggal 30 Agustus 2023

³⁷ Informan IV (H. Rahmadi Jingga Ketua DPRD HST) wawancara tanggal 06 September 2023

Jabatan : Kepala Lapangan BPBD Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Tempat, Tanggal lahir : Birayang, 11 April 1973

Pendidikan : S-2

Alamat : Birayang

Uraian Wawancara :

BPBD merupakan koordinator penanggulangan bencana di daerah. Dalam penanggulangan bencana, mereka punya 3 pilar. Pertama, saat pra bencana. Kedua, saat bencana. Ketiga, saat pasca bencana. Jadi, kondisi pada saat banjir, mereka siaga selama 24 jam. Pada saat pra bencana, mereka meningkatkan edukasi dan sosialisasi. Keduanya tidak hanya dilakukan melalui pertemuan, tetapi juga melalui media sosial. Saat bencana mulai datang dan darurat, mereka melakukan evakuasi, mendirikan posko, dan lain-lain. Mereka juga melakukan pendataan awal dan akhir.

Setiap penanganan tidak semua masyarakat menyadari bahwa urusan bencana itu merupakan urusan bersama. Jadi, masih ada masyarakat beranggapan bahwa bencana hanya dibebankan kepada satu pihak. Maka dari itu, mereka lakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tetap peduli. Selain itu, juga ada kendala dari pihak internal mereka. Mereka memiliki staf terbatas, sedangkan bencana saat itu sangat besar kejadiannya. Peralatan juga sangat terbatas. Jadi, ada kendala dari masyarakat dan internal BPBD. Namun, kendala yang telah disebutkan tidak membuat mereka berkecil hati.

BPBD bersinergi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mereka tidak hanya memberikan saran, tetapi juga memberikan dukungan. Mereka juga mengalokasikan dana agar lebih ditingkatkan untuk BPBD Jadi, peran DPRD sangat terasa dampaknya.³⁸

6. Informan keenam

Nama : Zulkifli, S.Sos., M.IP.

Tempat, Tanggal Lahir : Amparaya, 2 November 1973

Pendidikan : S-2

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten
Hulu Sungai Tengah

Alamat : Jl. H. Sibli Imansyah, Barabai

Uraian Wawancara :

Melalui SKPD yang secara langsung bertanggung jawab terhadap penanganan korban bencana bersama *stakeholder* (pemangku kebijakan) lain, dalam hal ini BPBD, TNI dan polisi beserta komponen lainnya. Jadi, Dinas Sosial merangkul semua yang ada dalam penanganan membantu korban bencana banjir. Setelah banjir, penanganannya adalah untuk korban kerusakan berupa bedah rumah dengan dinas terkait, sebagai bentuk dampak kerusakan. Dinas Sosial beserta instansi terkait memiliki kendala terhadap sarana dan

³⁸ Informan V (H. Budi Haryanto kepala lapangan BPBD HST) wawancara tanggal 07 September 2023

prasarana karena ada keterbatasan. Adanya keterbatasan anggaran yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih rendah secara nasional.³⁹

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan dan mendapatkan data dari Informan, maka analisis data yang Peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan ialah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Pemerintah Daerah dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Informan pertama hingga keempat yang mana merupakan pihak DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan jawaban yang cukup variatif untuk fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Para Informan rata-rata menjawab bahwa melakukan pengawasan terhadap dana yang disalurkan untuk infrastruktur pembangunan yang berkaitan dengan banjir dan dampak bagi masyarakat atas hasil kerja Pemerintah daerah. Adanya dana dari APBD untuk pembenahan dan pembangunan ulang bangunan yang menjadi titik prioritas selama pra hingga pasca banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara fungsi dan wewenang, DPRD telah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dalam lingkup pemerintah daerah tingkat kabupaten. Namun, secara implementasi, apa

³⁹ Informan VI (Zulkifli, S.Sos., M.IP. Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah) wawancara tanggal 13 September 2023

yang telah dilakukan pengawasan, masih ada hal yang belum teratasi hingga menjadi salah satu muara permasalahan banjir yang pernah terjadi pada 2021 sampai 2023. Permasalahan tersebut berupa adanya di bagian bawah atau daerah hilir yang belum dinormalisasi. Dari segi anggaran, telah dikeluarkan, tetapi belum dapat diimplementasikan pemerintah daerah sehingga lahan pertanian sudah tidak bisa digunakan pada 3 tahun terakhir, sebagaimana pemaparan informan pertama.

Di sisi lain, selain melakukan fungsi pengawasan, tugas dan wewenang DPRD ialah melakukan penganggaran, melakukan anggaran dana APBD yang sesuai dengan keperluan dan harus di prioritaskan karena bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi. Artinya, baik dari segi fungsi pengawasan dan penganggaran dana, hal ini sudah sesuai dengan teori pengawasan DPRD telah melakukan keduanya yang berhubungan namun dari segi pengawasan masih kurang. Maka dari itu, pihak DPRD meminta pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan anggaran dana untuk kepentingan infrastruktur sehingga dampak banjir setidaknya dapat berkurang karena dampak banjir telah melumpuhkan ekonomi masyarakat. Hal itu sebagaimana penjelasan informan kedua.

Sebagaimana penjelasan informan pertama dan kedua, informan ketiga lebih menjelaskan bahwa DPRD telah menjalankan tugas dan wewenang pokoknya sebagai lembaga pengawasan. Sehingga pengawasan yang telah dilakukan sangat diperlukan dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar sesuai dengan hal yang harus diprioritaskan, bahkan bencana banjir merupakan prioritas

paling utama sehingga pemerintah daerah bisa melihat bahwa akibat dari adanya status prioritas, segala bentuk yang terdampak banjir harus dibenahi dan diperbaiki.

Infrastruktur berupa jalan dan jembatan banyak rusak dan terputus, padahal keduanya sangat penting bagi warga karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi ekonomi. DPRD melengkap fungsi dan wewenangnya berupa serap aspirasi masyarakat dan melakukan kerja sama dengan seluruh instansi terkait yang menangani bencana banjir. Namun, disebabkan keadaan darurat, maka pengawasan bencana banjir tidak bisa dilakukan dengan ketat dan maksimal. Sebagaimana gantinya dan seperti yang dikatakan oleh informan ketiga yang menyebutkan bahwa DPRD langsung melakukan pengawasan ke lapangan, informan keempat juga memberikan jawaban senada bahwa mereka berkoordinasi langsung dilapangan dengan BPBD dan dinas terkait selama bencana banjir berlangsung.

Jika kita melihat teori dan melihat kedudukan DPRD sesuai tugas dan wewenangnya, maka DPRD secara tidak langsung telah melakukan pengawasan, penganggaran, dan serap aspirasi sekaligus ketika bencana banjir Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 2021, 2022, dan 2023 walaupun masih kurang, karena fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah yang ada diteori, peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang tata tertib DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan belum sepenuhnya dilakukan oleh DPRD karena kualitas kinerja dalam penanganan banjir yang dilakukan pemerintah daerah masih tidak terselesaikan, dan pengawasan terhadap tahapan

dalam menangani banjir yang sesuai dengan teori masih kurang, padahal DPRD mengatakan dalam wawancara salah satu pengawasannya melihat dari dampak dimasyarakat, tetapi pada kenyataannya bencana banjir terus melanda dalam 3 tahun terakhir ini.

Pemerintah daerah yang berada di tingkat eksekutif juga sangat lambat dalam menangani tahapan penanganan banjir salah satunya tahapan pasca banjir, mereka lebih memprioritaskan pada saat terjadinya banjir dan memperbaiki bangunan yang rusak akibat banjir, tetapi dalam menanggulangi pasca bencana banjir masih minim padahal tahapan ini sangat penting agar mengurangi bencana banjir di daerah Hulu Sungai Tengah.

Adapun yang membedakan ialah dalam tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Dengan demikian, tanpa adanya tumpang tindih wewenang yang terjadi, pemerintahan daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas menyelesaikan masalah bencana banjir sehingga belum terwujud pemerintahan daerah yang baik yang sesuai dengan teori demokrasi. Sebagaimana asas otonomi daerah, pemerintah daerah tingkat eksekutif beserta DPRD tingkat legislatif menjadi mitra kerja sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah yang bertujuan mensejahterakan rakyat.

Selain itu, menurut Sondang P. Siagian, sebagaimana teori pengawasan, yaitu berupa proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka DPRD di waktu yang bersamaan telah melakukan

pengawasan sesuai dengan yang ada, meskipun masih kurang terlaksana fungsi pengawasan tersebut

2. Upaya dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Daerah dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah berusaha memberikan upaya bersama pemerintah daerah dan juga instansi terkait dalam menangani bencana banjir. Namun, di saat bersamaan, ada kendala yang dihadapi berupa adanya sungai yang belum dinormalisasi yaitu sungai batang alai dan sungai barabai dan kendala paling besar ialah keterbatasan dana anggaran. Meskipun demikian, kendala tersebut tetaplah bagian dari upaya yang telah dilakukan agar perencanaan penanggulangan banjir supaya di sekolahan dan tempat-tempat lainnya ke depannya tidak banjir lagi. Adapun upaya terbesar yang telah dilakukan jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ialah pembangunan kolam regulasi beserta rencana pembangunan bendungan. Kolam regulasi berfungsi menampung air yang turun dari gunung dan ditampung supaya jangan sampai turun ke kota Barabai. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk penanganan banjir kedepannya maksimal, hal ini sesuai dengan teori penanganan banjir.

Selama ini apa yang telah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah lakukan sebagai bentuk pengawasan dalam kewenangannya sebagai lembaga parlemen juga masih kurang terlaksana dalam melaksanakan permasalahan bencana banjir yang terus terjadi di daerah kita dibutuhkan keseriusan bagi semua instrumen di Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sangat penting BPBD

dan Dinas Sosial. Agar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai representatif masyarakat Hulu Sungai Tengah melakukan fungsi check and balance terhadap lembaga eksekutif, dalam hal ini ialah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah yang lebih responsif dan mensejahterakan rakyatnya. Artinya, hal ini menginginkan bahwa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus responsif dalam urusan bencana banjir yang menjadi salah fokus utama untuk dicegah. Model atau pendekatan yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bentuk pengendalian langsung dan merupakan salah satu kategori pengawasan represif yang lebih mudah dilaksanakan dan efektif. Sehingga secara langsung, masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melihat kinerja DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana fungsinya.

Adapun upaya yang masih kurang dilaksanakan oleh DPRD yaitu pada saat peyerapan aspirasi masyarakat, yaitu masalah penanganan bencana banjir yang dirasakan oleh masyarakat, DPRD hanya terfokus pada masalah perbaikan bangunan dimasyarakat, tanpa memikirkan pencegahan bencana banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dari aspirasi masyarakat kebanyakan mengharapkan agar diperbaiki saluran-saluran air seperti solokan yang ada di seluruh daerah Hulu Sungai Tengah, karena saluran-saluran tersebut kurang berfungsi lagi akibat dari bencana banjir yang terdahulu.

Upaya dari pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah belum menyelesaikan dalam bidang pertanian, yang telah disampaikan anggota DPRD komisi II bapak Yajid Fahmi, ada pengendapan lumpur di beberapa lahan pertanian, akibatnya

lahan pertanian sudah tidak bisa digunakan pada 3 tahun terakhir ini, padahal diharapkan DPRD dan masyarakat dari tahun 2021 setelah banjir besar permasalahan ini sudah bisa di selesaikan karena sudah dianggarkan. Hal ini sesuai dengan upaya dalam penanganan banjir yang ada diteori dan juga agar terciptanya demokrasi, karena dalam bidang pertanian ini sangat penting bagi daerah yang sebagian mayoritas masyarakat Hulu Sungai Tengah bekerja sebagai petani.